



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

DKI Bantu 5.061 Mahasiswa Miskin

JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta meluncurkan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) untuk 5.061 mahasiswa. Besaran KJMU Rp18 juta/orang/tahun itu bertujuan agar mahasiswa berlatar belakang ekonomi rendah dapat menuntaskan kuliahnya.

Program KJMU diberikan kepadaribuan mahasiswa yang menempuh pendidikan tinggi tahun ajaran 2018/2019 di 90 perguruan tinggi negeri (PTN) se-Indonesia. “Nominal yang diberikan Rp9 juta per semester untuk satu mahasiswa. Jadi, satu tahun Rp18 juta yang dipakai untuk membayar biaya kuliah dan kegiatan lainnya,” ujar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta kemarin.

KJMU merupakan program pemerintah daerah yang sebagian besar didanai oleh pajak dari masyarakat Jakarta. Di berharap mahasiswa penerima manfaat KJMU dapat memberikan imbal balik berupa prestasi selama menempuh pendidikan tinggi, sekaligus bermanfaat melalui karya sesuai meraih gelar akademis dari kampus masing-masing.

Mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu berpesan agar kesempatan kuliah tidak disia-siakan dan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan meraih prestasi akademis, sekaligus pengembangan diri di luar kelas. Prestasi akademik tinggi dan kemampuan kepemimpinan harus didapatkan, sekaligus tumbuh berkembang dengan baik. “Bangsa ini membutuhkan banyak pemimpin terdidik. Karena itu, saya ingin teman-teman semua penerima

KJMU, anda melihat ini sebagai sebuah tanggung jawab bahwa saya harus menjadi pemimpin,” kata Anies.

Penerima KJMU tahun ajaran 2018/2019 sebanyak 5.061 mahasiswa yang tersebar di 90 PTN, yaitu 6 PTN di Jakarta sebanyak 3.627 mahasiswa dan 84 PTN di luar wilayah Jakarta sebanyak 1.434 mahasiswa.

Jumlah penerima KJMU dan kampus yang bekerja sama dengan Pemprov DKI sejak 2016-2019 terus meningkat signifikan, yaitu 594 mahasiswa di 46 PTN (2016), 2.191 mahasiswa di 68 PTN (2017), 4.542 mahasiswa di 85 PTN (2018), serta 5.061 mahasiswa di 90 PTN (2019).

Melalui Pergub Nomor 97 Tahun 2019, sasaran penerima KJMU diperluas pada 2020 yakni tidak hanya bagi mahasiswa tidak mampu yang kuliah di PTN di bawah Kemristek-Dikti dan Kemenag, tetapi juga menjangkau mahasiswa tidak mampu yang kuliah di perguruan tinggi swasta (PTS).

“Kami kemarin bermitra bukan saja dengan PTN, tapi juga dengan PTS. Karena semua terlibat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa baik negeri maupun swasta. Negeri atau swasta itu hanya status sesungguhnya proses belajar-mengajarnya sama. Dosennya pun

Kami kemarin bermitra bukan saja dengan PTN, tapi juga dengan PTS. Karena semua terlibat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa baik negeri maupun swasta.

ANIES BASWEDAN
Gubernur DKI Jakarta

apalagi yang akreditasinya A, insyaallah kinerja pembela-jarannya tidak kalah dengan kampus negeri,” ungkapnya.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Ratiyono menuturkan, penerima KJMU tidak boleh mendapatkan beasiswa dari institusi lain, kemudian memiliki indeks prestasi yang bagus sehingga bisa termotivasi untuk nilai yang lebih bagus. Sebelum mendapatkan KJMU, mahasiswa harus mendaftar terlebih dulu lalu Dinas Pendidikan akan memverifikasi dan setelah diputuskan langsung dicairkan oleh Bank DKI yang nantinya bisa diambil langsung mahasiswa bersangkutan. “Nanti pertanggung-jawaban bayar ke kampus itu, ya mahasiswa. Berapa uang kuliahnya, sisanya adalah biaya personal,” ujarnya.

Adapun persyaratan lolos verifikasi yakni dari kalangan orang tua tidak mampu. Kriteriaanya sudah ditelusuri dan umumnya ketika mereka duduk di bangku SMA telah mendapatkan Kartu Jakarta Pintar (KJP) sehingga begitu lulus,

mereka langsung memperoleh KJMU. “Prestasinya harus tinggi. IP minimal tiga. Mahasiswa itu lebih dewasa dan bisa mengelola kebutuhannya,” kata Ratiyono.

Anggota DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike meminta Dinas Pendidikan mengawasi langsung penggunaan KJMU agar program tersebut tepat sasaran. Jangan sampai bantuan yang diberikan melalui KJMU tidak bermanfaat.

Di tempat lain, Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi mendata ratusan SD dan SMP di wilayahnya belum dilengkapi kursi dan meja hingga tahun ini. Kondisi itu membuat kegiatan belajar mengajar dilakukannya di lantai.

Kabid Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Herry Herlanggam mengatakan, tercatat 715 ruang kelas belum dilengkapi kursi dan meja untuk tingkat SD/SMP. “Kegiatan pembelian mebel sedang berlangsung, siswa diminta bersabar,” ucapnya.

Menurut dia, penyebab ketiadaan kursi dan meja itu beragam mulai dari perbedaan kalender anggaran dan kalender pendidikan sampai tidak terserapnya anggaran. Untuk pengadaan meja dan kursi saat ini diserahkan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Pada APBD 2018 sudah dianggarkan pembelian meja dan kursi untuk 600 ruang kelas sebesar Rp30 miliar. Sisanya, 715 ruang kelas lagi akan dianggarkan pada tahun anggaran 2019. Dinas PUPR mempunyai kewajiban mengadakan mebel untuk tiga lokal.

● **bima setiyadi/abdullah m surjaya**